KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Dokter Magang Tetap Bekerja Meski Sakit dan Kelelahan
Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Dokter Magang Tetap Bekerja meski Sakit dan Kelelahan

JAKARTA, KOMPAS — Kematian empat dokter magang dalam tiga bulan terakhir mencerminkan kegagalan sistemik program kedokteran *internship* atau magang di Indonesia. Hal ini membuka fakta dokter magang tetap bekerja meski sakit, kelelahan, dan menghadapi tekanan mental. Hasil survei menunjukkan beban kerja mereka sama dengan dokter definitif.

Terkait hal itu, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), saat mengadu ke Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (11/5/2026) mendesak pemerintah memperkuat sistem dan perlindungan kerja. Tujuannya agar kematian dokter karena beban kerja berlebih hingga perundungan di fasilitas kesehatan tak terulang.

"Kami ingin tak terjadi lagi kematian dokter. Ke depan jam kerja kami mesti diatur agar tidak jadi beban mental dokter," kata Sekretaris Jenderal ISMKI Muhamad Thoriq.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai, tragedi kematian empat dokter magang hanyalah "puncak gunung es" dari masalah yang jauh lebih besar pada sistem pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan Indonesia. Pihaknya akan segera memanggil pemerintah dan pihak terkait untuk mengusut kasus ini.

Beban kerja berlebih, lemahnya pengawasan regulasi, hingga status ketenagakerjaan abu-abu menjadi penyebab beratnya tekanan kerja bagi dokter magang. Hal ini terungkap dalam survei oleh Asosiasi Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) dan Program Internship Dokter Gigi Indonesia (PIDGI) pada 8-9 April 2026. Survei itu melibatkan 2.620 responden peserta *internship* pada periode Mei 2025 sampai Februari 2026. Jumlah itu merepresentasikan 18,3 persen dari semua peserta *internship* periode itu.

Chief Komunikasi Publik Asosiasi PIDI-PIDGI Isina Gustri dalam pernyataan tertulis, di Jakarta, Senin, mengatakan, kematian empat dokter magang membuka fakta bahwa dokter *internship* tetap bekerja meski sakit, kelelahan, dan mengalami tekanan mental. Hal ini juga menunjukkan ada kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Hasil survei itu menunjukkan ada masalah yang konsisten dan sistemik dalam pelaksanaan program *internship* di sejumlah wilayah. Lima isu utama tergambar dari hasil survei itu, yakni beban kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kesejahteraan dan insentif, kewenangan dan kompetensi, serta monitoring, evaluasi, dan pendampingan dokter *internship*.

Terkait beban kerja, survei menunjukkan 12,5 persen peserta *internship* mengaku bekerja melebihi batas toleransi jam kerja yang ditetapkan. Sebanyak 79,3 persen menilai beban kerja yang dimiliki setara atau lebih berat dibandingkan dengan dokter definitif yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

"Kondisi ini menunjukkan pergeseran peran *internship* dari proses pemelajaran menjadi penopang layanan kesehatan," kata Isina.

Survei itu juga menemukan 16,9 persen peserta kesulitan mendapat izin sakit. Sebanyak 18,1 persen responden juga tak mendapat jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang memadai. Hal tersebut memaksa peserta tetap bekerja saat sakit yang sebenarnya membahayakan diri sendiri dan pasien.

Sebanyak 83,4 persen responden juga menyatakan bantuan hidup ataupun insentif yang diterima belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, pembayaran bantuan biaya hidup dan insentif juga terlambat. Di sejumlah daerah, besaran bantuan biaya hidup (BBH) jauh dari upah minimum regional setempat.

Terkait kewenangan dan kompetensi, ada 26,4 persen responden yang mendapat tugas dan pekerjaan di luar kewajiban sebagai dokter magang. Sebanyak 18,8 persen responden juga mendapatkan pekerjaan di luar kompetensi yang ditetapkan.

Sebanyak 23,3 persen responden tak mendapat supervisi rutin. Sebanyak 62,3 persen responden mengatakan tak ada evaluasi berkala dari pemangku kepentingan terhadap wahana *internship*. "Hal ini menunjukkan sistem pembinaan dan pengawasan belum berjalan optimal," ujar Isina.

Perbaikan

Terkait hal itu, Asosiasi PIDI-PIDGI mendorong agar Kementerian Kesehatan dan semua pemangku kepentingan terkait melakukan perbaikan, antara lain, lewat penegakan kepatuhan jam kerja serta penertiban praktik tanpa supervisi dan pelimpahan wewenang ke dokter *internship* di luar kewenangan. Keselamatan dan kesehatan kerja dokter magang dan perlindungan hukum juga harus dipastikan.

Setiap dokter *internship* perlu mendapat upah layak dan berkeadilan sesuai beban kerja, tanggung jawab, dan risiko kerja, termasuk pemberian hak jasa layanan. "Perbaikan program *internship* penting bagi peserta dan keberlanjutan sistem layanan kesehatan," kata Isina.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Kamis (7/5), menuturkan, Kemenkes akan merevisi prosedur operasi standar dokter *internship*. Empat poin utama revisi itu, antara lain, standardisasi jam kerja dengan batas maksimal 40 jam per minggu dengan satu hari libur tiap minggu. Peserta *internship* dilarang menggantikan fungsi dokter organik dan fokus pada pemelajaran dengan pengawasan supervisor aktif. (TAN/TIO)